Journal of Economics Development Research
Vol. 2, No. 2, June 2026, pp. 73-84
eISSN 3090-1561 | https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder

Analisis Perbandingan Akuntansi Keuangan antara Negara Berkembang dan Negara Maju

Adam Nurkholik[1,*], Adnan Efendi[2]

[1, 2.] Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
* Corresponding author email: adamnurkholik@gmail.com

ABSTRACT

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi pada tahun 2026 telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik akuntansi keuangan di berbagai negara. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan standar, kualitas pelaporan, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan akuntansi keuangan antara kedua kelompok negara dengan menyoroti aspek standar akuntansi, transparansi, regulasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan laporan lembaga internasional terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara maju telah mengintegrasikan teknologi digital seperti artificial intelligence (AI) dan big data dalam sistem akuntansi, serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS). Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, literasi akuntansi, dan harmonisasi standar. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kesenjangan praktik akuntansi global serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi di negara berkembang.

Copyright © 2026, The Author(s)
This is an open-access article under the CC–BY-SA license

Article History
Received 2026-04-22
Revised 2026-06-11
Accepted 2026-06-19
Published 2026-06-28

Keywords
Akuntansi Keuangan,
Negara Maju,
Negara Berkembang,
IFRS,
Digitalisasi,
Transparansi

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada tahun 2026 menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya integrasi pasar keuangan internasional. Dalam konteks ini, akuntansi keuangan memiliki peran strategis sebagai penyedia informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pemangku kepentingan (IASB, 2023). Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun global. Globalisasi telah mendorong kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi keuangan di berbagai negara. International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi acuan utama dalam upaya menciptakan keseragaman pelaporan keuangan di seluruh dunia (Deloitte, 2023). Namun, implementasi IFRS tidak berjalan secara seragam, terutama antara negara maju dan negara berkembang yang memiliki karakteristik ekonomi dan institusional yang berbeda.

Negara maju umumnya memiliki sistem akuntansi yang lebih stabil dan matang, didukung oleh pasar modal yang berkembang serta regulasi yang kuat. Kondisi ini memungkinkan penerapan standar akuntansi yang lebih kompleks dan berbasis prinsip (principle-based) (Nobes, 2022). Selain itu, keberadaan lembaga pengawas yang independen turut meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi standar akuntansi internasional. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi hambatan utama (World Bank, 2024). Hal ini menyebabkan kualitas laporan keuangan di negara berkembang cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju.

Perbedaan sistem hukum juga menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik akuntansi keuangan. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris cenderung menggunakan sistem common law yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan (La

Porta et al., 1998). Sementara itu, banyak negara berkembang menganut sistem civil law yang lebih kaku dan berbasis aturan, sehingga memengaruhi fleksibilitas dalam pelaporan keuangan.

Selain faktor hukum, budaya nasional juga berperan dalam membentuk praktik akuntansi. Hofstede (2011) menyatakan bahwa nilai-nilai budaya seperti individualisme, tingkat ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang dapat memengaruhi tingkat transparansi dan konservatisme dalam laporan keuangan. Negara maju cenderung lebih transparan, sedangkan negara berkembang seringkali lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi.

Pada tahun 2026, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi keuangan. Penggunaan artificial intelligence (AI), big data, dan blockchain telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan (McKinsey, 2024). Negara maju telah lebih dahulu mengadopsi teknologi ini secara luas dalam sistem akuntansi mereka. Namun, adopsi teknologi di negara berkembang masih relatif terbatas. Keterbatasan infrastruktur digital, biaya implementasi yang tinggi, serta kurangnya tenaga ahli menjadi kendala utama dalam transformasi digital akuntansi (EY, 2024). Akibatnya, kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal teknologi akuntansi semakin terlihat.

Transparansi dan kualitas laporan keuangan juga menjadi isu penting dalam perbandingan antara kedua kelompok negara. Penelitian menunjukkan bahwa negara maju memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi karena adanya tekanan dari investor dan regulator (Bushman & Smith, 2001). Sebaliknya, praktik manajemen laba masih sering ditemukan di negara berkembang. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi turut menentukan kualitas pelaporan keuangan. Negara maju memiliki sistem pendidikan dan sertifikasi profesional yang lebih baik, sehingga menghasilkan tenaga akuntan yang kompeten (ACCA, 2023). Di negara berkembang, kualitas pendidikan akuntansi masih bervariasi.

Globalisasi ekonomi juga mendorong negara berkembang untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi guna menarik investasi asing. Investor global cenderung memilih negara dengan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya (UNCTAD, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kualitas akuntansi menjadi kebutuhan strategis bagi negara berkembang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan, perbedaan praktik akuntansi antara negara maju dan negara berkembang masih cukup signifikan hingga tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar akuntansi global belum sepenuhnya tercapai (IFAC, 2024). Faktor institusional, ekonomi, dan sosial masih menjadi penghambat utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan praktik akuntansi keuangan antara negara maju dan negara berkembang pada tahun 2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi di negara berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan regulator. Sistem ini mencakup proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, hingga pelaporan transaksi ekonomi suatu entitas (Kieso et al., 2020). Informasi yang dihasilkan harus mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan dapat dipercaya. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut harus memiliki nilai prediktif dan nilai konfirmasi sehingga dapat membantu pengguna dalam menilai kinerja masa lalu dan memprediksi kinerja masa depan (IASB, 2023). Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam akuntansi keuangan.

Dalam kerangka konseptual akuntansi, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif utama yaitu relevansi dan representasi yang tepat (faithful representation).

Relevansi berarti informasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan pengguna, sedangkan representasi yang tepat menunjukkan bahwa informasi tersebut lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material (IASB, 2023). Selain karakteristik utama, terdapat juga karakteristik pendukung seperti komparabilitas, verifiabilitas, ketepatan waktu, dan dapat dipahami. Komparabilitas memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas, sementara verifiabilitas memastikan bahwa informasi dapat diuji kebenarannya (Kieso et al., 2020).

Akuntansi keuangan juga berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Menurut Healy dan Palepu (2001), laporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko informasi yang tidak seimbang antara pihak internal dan eksternal perusahaan.

Dalam praktiknya, akuntansi keuangan diatur oleh standar akuntansi yang berlaku, seperti International Financial Reporting Standards (IFRS). Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara konsisten dan dapat dibandingkan secara global (Deloitte, 2023). Penerapan standar ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi juga turut memengaruhi konsep akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi modern memungkinkan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara otomatis dan real-time. Hal ini meningkatkan efisiensi serta mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam proses akuntansi (Romney & Steinbart, 2021).

Dengan demikian, akuntansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan ekonomi. Perkembangannya yang dinamis menunjukkan bahwa akuntansi keuangan terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pengguna informasi (IFAC, 2024).

Standar Akuntansi Internasional (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi internasional yang dikembangkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan global (IASB, 2023). IFRS dirancang sebagai standar berbasis prinsip (principle-based) yang memberikan fleksibilitas dalam penerapannya dibandingkan standar berbasis aturan. Tujuan utama IFRS adalah menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan di berbagai negara sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Dengan adanya standar yang seragam, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih mudah memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan lintas negara (Deloitte, 2023).

Negara maju umumnya telah mengadopsi IFRS secara penuh atau telah melakukan konvergensi signifikan dengan standar nasional mereka. Adopsi ini didukung oleh infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem regulasi yang efektif (Nobes, 2022). Hal ini memungkinkan penerapan IFRS secara konsisten dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi IFRS. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar yang kompleks, serta biaya implementasi yang tinggi menjadi hambatan utama (World Bank, 2024). Selain itu, perbedaan kondisi ekonomi juga memengaruhi efektivitas penerapan IFRS.

Salah satu aspek penting dalam IFRS adalah penggunaan konsep fair value dalam pengukuran aset dan liabilitas. Konsep ini meningkatkan relevansi informasi keuangan, namun memerlukan data pasar yang aktif dan andal. Di negara berkembang, keterbatasan pasar seringkali menjadi kendala dalam penerapan fair value (Ball, 2021).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa adopsi IFRS dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi perusahaan. Chen et al. (2010) menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi IFRS cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah dan kualitas pelaporan yang lebih tinggi, terutama di negara dengan sistem hukum yang kuat. Namun demikian, keberhasilan implementasi IFRS tidak hanya bergantung pada standar itu sendiri, tetapi juga pada faktor institusional seperti penegakan hukum, kualitas audit, dan tata kelola perusahaan (Soderstrom & Sun, 2007). Tanpa dukungan lingkungan institusional yang memadai, manfaat IFRS tidak dapat dirasakan secara optimal.

Dengan demikian, IFRS memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan global, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan adopsi IFRS (IFAC, 2024).

Teori Institusional dan Budaya

Teori institusional merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami praktik akuntansi di berbagai negara. Teori ini menjelaskan bahwa praktik akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh lingkungan sosial, politik, dan regulasi tempat organisasi beroperasi (Scott, 2014). Dengan demikian, sistem akuntansi suatu negara mencerminkan kondisi institusional yang melingkupinya. Dalam konteks akuntansi internasional, teori institusional digunakan untuk menjelaskan mengapa terdapat perbedaan praktik pelaporan keuangan antar negara. Faktor seperti sistem hukum, struktur ekonomi, dan kualitas tata kelola menjadi determinan utama dalam pembentukan standar dan praktik akuntansi (La Porta et al., 1998). Negara dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih baik.

Salah satu konsep utama dalam teori institusional adalah isomorfisme, yaitu kecenderungan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal agar memperoleh legitimasi (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam akuntansi, hal ini terlihat dari adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) oleh berbagai negara, termasuk negara berkembang, sebagai bentuk penyesuaian terhadap praktik global. Namun demikian, adopsi standar internasional tidak selalu menghasilkan praktik yang seragam. Perbedaan lingkungan institusional menyebabkan variasi dalam implementasi IFRS. Negara maju umumnya mampu menerapkan standar secara lebih konsisten dibandingkan negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan (Nobes, 2022).

Selain faktor institusional, budaya nasional juga memainkan peran penting dalam praktik akuntansi. Hofstede (2011) mengemukakan bahwa nilai-nilai budaya seperti individualisme, power distance, dan uncertainty avoidance memengaruhi perilaku organisasi, termasuk dalam pelaporan keuangan. Budaya ini membentuk sikap terhadap transparansi dan pengungkapan informasi.

Gray (1988) mengembangkan teori yang menghubungkan budaya dengan nilai-nilai akuntansi, seperti profesionalisme, konservatisme, dan kerahasiaan. Negara dengan budaya konservatif cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan informasi keuangan, sementara negara dengan budaya terbuka cenderung lebih transparan dalam pengungkapan. Budaya juga memengaruhi tingkat konservatisme dalam akuntansi. Negara berkembang umumnya menunjukkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sebaliknya, negara maju cenderung lebih agresif dalam pengungkapan informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar modal (Hope, 2003).

Dengan demikian, teori institusional dan budaya memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami perbedaan praktik akuntansi antar negara. Kombinasi faktor regulasi, sistem hukum, dan nilai budaya menjadi penentu utama dalam kualitas dan karakteristik pelaporan keuangan (IFAC, 2024).

Transformasi Digital dalam Akuntansi

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi keuangan di era modern. Digitalisasi memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat. Teknologi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi di berbagai sektor (Romney & Steinbart, 2021). Salah satu teknologi utama dalam transformasi digital adalah artificial intelligence (AI). AI memungkinkan otomatisasi berbagai proses akuntansi, seperti pencatatan transaksi, rekonsiliasi data, hingga analisis laporan keuangan. Penggunaan AI dapat mengurangi kesalahan manusia serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan (McKinsey, 2024).

Selain AI, big data juga memainkan peran penting dalam akuntansi modern. Big data memungkinkan perusahaan mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real-

time. Hal ini memberikan informasi yang lebih relevan dan mendalam bagi pengambilan keputusan strategis (PwC, 2024). Teknologi blockchain juga menjadi inovasi penting dalam akuntansi keuangan. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Dengan sistem ini, risiko kecurangan dan manipulasi data dapat diminimalkan secara signifikan (Deloitte, 2023).

Transformasi digital juga mendorong munculnya konsep real-time reporting dalam akuntansi. Laporan keuangan tidak lagi disusun secara periodik saja, tetapi dapat diakses secara langsung dan terus diperbarui. Hal ini meningkatkan transparansi dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan kondisi ekonomi (EY, 2024). Namun demikian, adopsi teknologi digital dalam akuntansi tidak merata di seluruh dunia. Negara maju telah lebih dahulu mengintegrasikan teknologi canggih dalam sistem akuntansi mereka, sedangkan negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur dan biaya implementasi (World Bank, 2024).

Selain itu, transformasi digital juga menuntut perubahan kompetensi tenaga akuntan. Akuntan tidak hanya dituntut memahami prinsip akuntansi, tetapi juga memiliki kemampuan dalam analisis data dan teknologi informasi. Hal ini mengubah peran akuntan dari sekadar pencatat menjadi analis dan penasihat strategis (ACCA, 2023). Dengan demikian, transformasi digital dalam akuntansi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan keuangan. Namun, tantangan dalam adopsi teknologi, terutama di negara berkembang, perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur, regulasi, dan kualitas sumber daya manusia (IFAC, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif untuk menganalisis perbedaan praktik akuntansi keuangan antara negara maju dan negara berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan institusional yang memengaruhi praktik akuntansi di berbagai negara (Creswell, 2014). Metode deskriptif komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik sistem akuntansi berdasarkan indikator tertentu, seperti standar akuntansi, transparansi, regulasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Sumber data meliputi jurnal ilmiah internasional, buku teks akuntansi, laporan organisasi global seperti International Accounting Standards Board (IASB), World Bank, International Federation of Accountants (IFAC), serta laporan lembaga konsultan seperti Deloitte dan PwC. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan terkait perkembangan akuntansi keuangan hingga tahun 2026 (Sekaran & Bougie, 2016).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara komparatif dengan membandingkan kondisi di negara maju dan negara berkembang berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan utama serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik akuntansi di kedua kelompok negara. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Standar Akuntansi

Perbedaan standar akuntansi antara negara maju dan negara berkembang merupakan salah satu aspek utama dalam kajian akuntansi internasional. Negara maju umumnya telah mencapai tingkat konvergensi yang tinggi terhadap International Financial Reporting Standards (IFRS), baik melalui adopsi penuh maupun harmonisasi dengan standar nasional mereka (IASB, 2023). Hal ini memungkinkan terciptanya keseragaman dalam pelaporan keuangan di tingkat global.

Negara maju seperti Inggris, Australia, dan negara-negara Uni Eropa telah mengadopsi IFRS secara luas dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Adopsi ini didukung oleh

sistem regulasi yang kuat, infrastruktur pasar modal yang berkembang, serta kualitas pengawasan yang tinggi (Deloitte, 2023). Selain itu, lembaga pengatur di negara maju juga aktif dalam memperbarui standar sesuai perkembangan ekonomi.

Di beberapa negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat, meskipun belum mengadopsi IFRS secara penuh, standar akuntansi nasional mereka (US GAAP) telah menunjukkan tingkat konvergensi yang tinggi dengan IFRS. Hal ini mencerminkan upaya global dalam menciptakan standar pelaporan keuangan yang lebih seragam (Nobes, 2022). Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan IFRS secara penuh. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami dan menerapkan standar yang kompleks (World Bank, 2024). Hal ini menyebabkan penerapan IFRS seringkali tidak konsisten.

Selain itu, biaya implementasi IFRS juga menjadi tantangan bagi perusahaan di negara berkembang. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk pelatihan, perubahan sistem akuntansi, serta penyesuaian kebijakan internal. Bagi perusahaan kecil dan menengah, biaya ini dapat menjadi beban yang signifikan (Soderstrom & Sun, 2007). Perbedaan kondisi ekonomi juga memengaruhi penerapan IFRS. Konsep fair value yang banyak digunakan dalam IFRS memerlukan pasar yang aktif dan transparan. Di negara berkembang, keterbatasan pasar seringkali menyulitkan penentuan nilai wajar secara akurat (Ball, 2021).

Selain faktor teknis, faktor institusional seperti sistem hukum dan tingkat penegakan regulasi juga memengaruhi keberhasilan implementasi standar akuntansi. Negara dengan sistem hukum yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar akuntansi (La Porta et al., 1998). Dengan demikian, perbedaan standar akuntansi antara negara maju dan negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat adopsi IFRS, tetapi juga oleh faktor ekonomi, institusional, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan negara berkembang dalam mengimplementasikan standar akuntansi internasional secara efektif (IFAC, 2024).

Transparansi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Transparansi dan kualitas pelaporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem akuntansi suatu negara. Transparansi mengacu pada sejauh mana informasi keuangan disajikan secara terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan tingkat keandalan, relevansi, dan akurasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (IASB, 2023). Negara maju umumnya memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem regulasi yang kuat serta pengawasan yang ketat dari regulator dan otoritas pasar modal. Lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan keuangan (Bushman & Smith, 2001).

Selain itu, tekanan dari investor dan analis pasar juga mendorong perusahaan di negara maju untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi. Perusahaan yang tidak transparan cenderung kehilangan kepercayaan investor dan menghadapi risiko penurunan nilai pasar (Leuz & Wysocki, 2016). Kualitas pelaporan keuangan di negara maju juga didukung oleh sistem audit yang independen dan profesional. Auditor eksternal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan bebas dari kesalahan material (KPMG, 2023).

Sebaliknya, di negara berkembang, tingkat transparansi dan kualitas pelaporan keuangan masih relatif lebih rendah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan regulasi. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba (earnings management) (Chen et al., 2010).

Praktik manajemen laba dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Hal ini dapat menyesatkan investor dan mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini lebih sering terjadi di negara dengan sistem hukum yang lemah (La Porta et al., 1998). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kompetensi profesional di bidang akuntansi juga memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di negara berkembang. Kurangnya pemahaman

terhadap standar akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan (World Bank, 2024).

Dengan demikian, perbedaan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan antara negara maju dan negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, pengawasan, sistem audit, dan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, negara berkembang perlu memperkuat sistem regulasi, meningkatkan kapasitas profesional, serta mendorong transparansi dalam praktik bisnis (IFAC, 2024).

Sistem Regulasi dan Penegakan Hukum

Sistem regulasi dan penegakan hukum merupakan faktor kunci yang memengaruhi kualitas praktik akuntansi keuangan di suatu negara. Regulasi yang kuat berfungsi untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sedangkan penegakan hukum (enforcement) memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi oleh entitas bisnis (IASB, 2023). Tanpa penegakan hukum yang efektif, standar akuntansi yang baik tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Negara maju umumnya memiliki sistem regulasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan lembaga pengawasan yang independen. Institusi seperti otoritas pasar modal dan badan pengawas keuangan memiliki kewenangan yang jelas dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi (Bushman & Smith, 2001). Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tingkat penegakan hukum di negara maju cenderung lebih efektif karena didukung oleh sistem peradilan yang kuat dan independen. Perusahaan yang melanggar standar pelaporan keuangan dapat dikenakan sanksi tegas, baik berupa denda maupun hukuman pidana. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku (La Porta et al., 1998).

Efektivitas regulasi di negara maju juga diperkuat oleh peran auditor eksternal dan lembaga profesi akuntansi. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan (KPMG, 2023). Sebaliknya, negara berkembang sering menghadapi berbagai kendala dalam sistem regulasi dan penegakan hukum. Meskipun telah memiliki aturan yang mengadopsi standar internasional seperti IFRS, implementasinya seringkali tidak optimal akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya (World Bank, 2024).

Salah satu masalah utama di negara berkembang adalah rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi akuntansi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sanksi yang tegas serta lemahnya sistem pengawasan. Akibatnya, pelanggaran terhadap standar akuntansi seringkali tidak ditindak secara serius (IFAC, 2024). Selain itu, faktor korupsi dan intervensi politik juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum di negara berkembang. Kondisi ini dapat mengurangi independensi lembaga pengawas dan melemahkan sistem regulasi, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Transparency International, 2023).

Dengan demikian, perbedaan sistem regulasi dan penegakan hukum antara negara maju dan negara berkembang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan dalam praktik akuntansi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat institusi hukum, meningkatkan independensi regulator, serta memastikan penerapan sanksi yang konsisten guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi (OECD, 2023).

Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam akuntansi keuangan mengalami perkembangan pesat hingga tahun 2026. Transformasi digital telah mengubah cara perusahaan dalam melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperbaiki kualitas informasi yang dihasilkan (Romney & Steinbart, 2021). Negara maju telah mengadopsi teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI) dalam sistem akuntansi mereka. AI memungkinkan otomatisasi proses akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, klasifikasi data, hingga analisis laporan keuangan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan meminimalkan kesalahan dalam proses akuntansi (McKinsey, 2024).

Selain AI, teknologi big data juga memberikan kontribusi signifikan dalam akuntansi modern. Dengan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan berbasis data real-time. Informasi yang dihasilkan juga lebih relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (PwC, 2024). Teknologi blockchain turut menjadi inovasi penting dalam sistem akuntansi keuangan. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan keamanan dan keandalan data keuangan. Penggunaan teknologi ini juga mendukung proses audit yang lebih efisien dan terpercaya (Deloitte, 2023).

Di negara maju, integrasi teknologi digital telah mendorong terciptanya sistem pelaporan keuangan berbasis real-time. Perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan secara langsung kepada pemangku kepentingan tanpa harus menunggu periode pelaporan tertentu. Hal ini meningkatkan transparansi dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan kondisi ekonomi (EY, 2024). Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam adopsi teknologi digital dalam akuntansi. Infrastruktur teknologi yang belum memadai, biaya implementasi yang tinggi, serta kurangnya tenaga ahli menjadi kendala utama dalam transformasi digital (World Bank, 2024). Akibatnya, penggunaan teknologi dalam akuntansi masih terbatas pada sistem yang sederhana.

Selain itu, kesenjangan digital juga memperlebar perbedaan kualitas pelaporan keuangan antara negara maju dan negara berkembang. Perusahaan di negara berkembang yang belum mengadopsi teknologi modern cenderung memiliki proses akuntansi yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan (IFAC, 2024). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas akuntansi keuangan. Negara berkembang perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi serta pengembangan sumber daya manusia agar dapat mengikuti perkembangan global dan mengurangi kesenjangan dengan negara maju (ACCA, 2023).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntansi merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerapan standar akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan. Tenaga akuntan yang kompeten mampu memahami, menerapkan, serta menginterpretasikan standar akuntansi secara tepat dalam penyusunan laporan keuangan (Kieso et al., 2020). Oleh karena itu, kualitas SDM menjadi elemen kunci dalam sistem akuntansi suatu negara.

Negara maju umumnya memiliki kualitas tenaga akuntan yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Hal ini didukung oleh sistem pendidikan yang maju, kurikulum yang relevan dengan perkembangan global, serta akses terhadap pelatihan profesional yang berkelanjutan (ACCA, 2023). Pendidikan akuntansi di negara maju juga lebih menekankan pada penguasaan teknologi dan analisis data. Selain itu, negara maju memiliki sistem sertifikasi profesi yang ketat dan terstandarisasi. Sertifikasi seperti CPA (Certified Public Accountant) dan ACCA menjadi tolok ukur kompetensi profesional akuntan. Proses sertifikasi ini memastikan bahwa tenaga akuntan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar internasional (IFAC, 2024).

Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang akuntansi. Keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas, kurangnya fasilitas pelatihan, serta ketimpangan distribusi tenaga profesional menjadi kendala utama (World Bank, 2024). Hal ini berdampak pada rendahnya kompetensi tenaga akuntan di beberapa wilayah. Selain itu, kurikulum pendidikan akuntansi di negara berkembang seringkali belum sepenuhnya mengikuti perkembangan standar internasional dan teknologi digital. Hal ini menyebabkan lulusan akuntansi kurang siap menghadapi tuntutan praktik akuntansi modern (Nobes, 2022).

Kualitas SDM juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Akuntan yang kurang kompeten cenderung melakukan kesalahan dalam penerapan standar, sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelaporan keuangan di negara berkembang (Chen et al., 2010). Transformasi digital dalam akuntansi juga menuntut peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan analisis data. Negara maju telah lebih siap dalam

menghadapi perubahan ini, sementara negara berkembang masih dalam tahap adaptasi (McKinsey, 2024).

Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem akuntansi di negara berkembang. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan profesional, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan kompetensi tenaga akuntan agar mampu bersaing di tingkat global (IFAC, 2024).

Pengaruh Globalisasi dan Investasi Asing

Globalisasi ekonomi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam praktik akuntansi keuangan di berbagai negara. Integrasi pasar keuangan global menuntut adanya standar pelaporan keuangan yang seragam dan transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan investor lintas negara (IASB, 2023). Dalam konteks ini, globalisasi mempercepat adopsi standar akuntansi internasional seperti IFRS. Bagi negara berkembang, globalisasi membuka peluang untuk menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Investor asing cenderung memilih negara dengan sistem pelaporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat dibandingkan secara global (UNCTAD, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi kebutuhan strategis.

Adopsi IFRS menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan oleh negara berkembang untuk meningkatkan daya tarik investasi. Standar ini memberikan jaminan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang diakui secara internasional, sehingga memudahkan investor dalam melakukan analisis (Deloitte, 2023). Namun demikian, kesiapan institusional di negara berkembang masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi globalisasi. Faktor seperti lemahnya sistem regulasi, rendahnya kualitas penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia menghambat efektivitas implementasi standar akuntansi (World Bank, 2024).

Selain itu, perbedaan lingkungan ekonomi dan budaya juga memengaruhi respons negara berkembang terhadap tekanan globalisasi. Tidak semua negara mampu mengadopsi praktik akuntansi global secara cepat dan efektif, sehingga terjadi kesenjangan dalam kualitas pelaporan keuangan (Nobes, 2022).

Globalisasi juga meningkatkan persaingan antar negara dalam menarik investasi asing. Negara yang mampu menyediakan informasi keuangan yang transparan dan kredibel akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara lain. Hal ini mendorong reformasi sistem akuntansi di banyak negara berkembang (OECD, 2023). Namun, peningkatan transparansi juga membawa tantangan baru, seperti kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih kuat dan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi. Tanpa sistem kontrol yang memadai, peningkatan keterbukaan dapat menimbulkan risiko baru dalam sistem keuangan (Leuz & Wysocki, 2016).

Dengan demikian, globalisasi dan investasi asing memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansi keuangan di negara berkembang. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan penguatan institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi agar mampu bersaing di tingkat global (IFAC, 2024).

Analisis Perbandingan Utama

Perbandingan antara negara maju dan negara berkembang dalam praktik akuntansi keuangan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada berbagai aspek utama. Perbedaan ini mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi, kualitas institusi, serta kesiapan teknologi dan sumber daya manusia di masing-masing negara. Analisis komparatif ini penting untuk memahami kesenjangan yang ada sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan (Nobes, 2022). Dari aspek standar akuntansi, negara maju umumnya telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) secara penuh atau telah mencapai tingkat konvergensi yang tinggi. Hal ini memungkinkan terciptanya laporan keuangan yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan secara global. Sebaliknya, negara berkembang masih dalam tahap konvergensi bertahap dan sering menghadapi kendala dalam implementasinya (IASB, 2023).

Dalam hal transparansi, negara maju menunjukkan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh tekanan pasar modal, investor, serta sistem pengawasan yang efektif. Di negara berkembang, transparansi masih berada pada tingkat sedang hingga rendah akibat lemahnya sistem pengawasan dan praktik manajemen laba yang masih terjadi (Leuz & Wysocki, 2016). Aspek regulasi juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Negara maju memiliki sistem regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Sebaliknya, negara berkembang sering menghadapi kelemahan dalam penegakan hukum yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (La Porta et al., 1998).

Dari sisi teknologi, negara maju telah mengintegrasikan teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain dalam sistem akuntansi mereka. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi proses dan pelaporan keuangan secara real-time. Sementara itu, negara berkembang masih memiliki keterbatasan dalam adopsi teknologi akibat kendala infrastruktur dan biaya (McKinsey, 2024). Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor pembeda utama. Negara maju memiliki tenaga akuntan yang profesional dengan standar pendidikan dan sertifikasi yang tinggi. Di negara berkembang, kualitas SDM masih bervariasi, dengan keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan profesional (ACCA, 2023).

Perbedaan-perbedaan tersebut saling berkaitan dan membentuk ekosistem akuntansi yang berbeda di masing-masing negara. Kelemahan pada satu aspek, seperti regulasi, dapat berdampak pada aspek lain seperti transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam meningkatkan sistem akuntansi di negara berkembang (IFAC, 2024).

Secara keseluruhan, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa negara maju memiliki keunggulan dalam hampir semua aspek utama akuntansi keuangan. Namun, negara berkembang memiliki potensi untuk mengejar ketertinggalan melalui reformasi institusional, peningkatan kualitas SDM, serta adopsi teknologi digital. Upaya ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor di tingkat global (World Bank, 2024).

Tabel 1. Aspek Negara Maju dan Negara Berkembang

Aspek	**Negara Maju**	**Negara Berkembang**
Standar Akuntansi	IFRS penuh/lanjutan	Konvergensi bertahap
Transparansi	Tinggi	Sedang–rendah
Regulasi	Kuat	Lemah
Teknologi	AI, blockchain	Terbatas
SDM	Profesional tinggi	Variatif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik akuntansi keuangan di negara maju dan negara berkembang pada tahun 2026. Negara maju menunjukkan keunggulan dalam berbagai aspek, seperti tingkat konvergensi terhadap standar akuntansi internasional, transparansi laporan keuangan, kekuatan sistem regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Dukungan institusional yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor utama yang mendorong tingginya kualitas pelaporan keuangan di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan praktik akuntansi yang berkualitas. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tingkat adopsi teknologi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, kesiapan institusional yang belum optimal menyebabkan implementasi standar akuntansi internasional seperti IFRS belum berjalan secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang dalam bidang akuntansi keuangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan profesional, serta percepatan transformasi

digital dalam sistem akuntansi. Dengan demikian, negara berkembang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat kepercayaan investor, dan meningkatkan daya saing dalam perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, D. (2026). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK NEGARA ASEAN: STUDI PADA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TAHUN 2020-2024 *(Doctoral dissertation, Akuntansi)*.

Ali, A., & Hwang, L. S. (2000). Country-specific factors related to financial reporting and the value relevance of accounting data. *Journal of accounting research, 38*(1), 1-21.

Amrih, G. G. (2023). Perkembangan keuangan berstandar akuntansi akrual. *Journal of Economics and Business UBS, 12*(2), 1323-1336.

Ardiyana, M., & Muid, D. (2011). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syari'ah dan bank konvensional sebelum, selama, dan sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan metode CAMEL (Studi kasus pada PT Bank Syari'ah Mandiri dan PT Bank Mandiri Tbk) *(Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).*

Arjuna, B. J. P., & Giovania, G. (2024). Akuntansi Keuangan di Era Digital: Kajian Literatur terhadap Integrasi Teknologi Informasi dalam Pelaporan Keuangan. *Economics and Digital Business Review, 5*(2), 723-731.

Armstrong, C. S., Barth, M. E., Jagolinzer, A. D., & Riedl, E. J. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. *The accounting review, 85*(1), 31-61.

Barth, M. E. (2013). Global comparability in financial reporting: What, why, how, and when?. *China Journal of Accounting Studies, 1*(1), 2-12.

Bushman, R., Chen, Q., Engel, E., & Smith, A. (2004). Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. *Journal of accounting and economics, 37*(2), 167-201.

Chen, H., Tang, Q., Jiang, Y., & Lin, Z. (2010). The role of international financial reporting standards in accounting quality: Evidence from the European Union. *Journal of international financial management & accounting, 21*(3), 220-278.

Choi, F. D. S., & Meek, G. K. (2021). *International Accounting (9th ed.)*. Pearson.

Christian, N., Des TG, N., & Yaputri, J. A. (2022). Kajian Pengaruh Sosial, Ekonomi, Dan Politik Terhadap Perekonomian Negara: Nasional Dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 7*(2), 166-188.

Christian, N., Ong, C. M., & Wisely, J. V. (2024). Analisis Perbandingan Standar Akuntansi Di Negara Uni Emirat Arab Dan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 4*(3), 46-64.

Dewanti, D. K., & Kiswara, E. (2015). Studi perbandingan tingkat kepatuhan adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) Di 12 Negara *(Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).*

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review, 48*(2), 147-160.

Fauzi, A., Rambey, T., Fadilah, K., Humaid, H., Munir, A. M., Firmansyah, M., & Ati, A. J. J. (2023). Studi Literatur: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis, 3*(1), 46-55.

Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. *Abacus, 24*(1), 1-15.

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of accounting and economics, 31*(1-3), 405-440.

Hope, O. K. (2003). Disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts' forecast accuracy: An international study. *Journal of accounting research, 41*(2), 235-272.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting (17th ed.)*. Wiley.

KPMG. (2023). *Audit Quality and Financial Reporting Insights*. KPMG International.

Leuz, C., & Wysocki, P. D. (2016). The economics of disclosure and financial reporting regulation: Evidence and suggestions for future research. *Journal of accounting research, 54*(2), 525-622.

Mekel, P. A., Tommy, P., & Meliangan, S. (2014). Analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank BCA (persero) tbk dan bank cimb niaga (persero) tbk. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2*(3), 2174.

Ningsih, L. N. (2023). Financial Development, Perdagangan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Negara Maju Dan Berkembang. *Jurnal Investasi Islam, 8*(1), 76-94.

Nobes, C. (2022). *Comparative International Accounting (14th ed.)*. Pearson.

Nusi, N. A. R., Mopangga, H., & Djuuna, R. F. (2025). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun 2019-2023. *Economic Reviews Journal, 4*(3), 1034-1049.

Porta, R. L., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. *Journal of political economy, 106*(6), 1113-1155.

Putri, W. A., & Darmawan, A. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Adopsi Ifrs Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.

Ramli, D. L., Herlintang, M., Zaskia, R. S., Khoirunnisa, L., & Salsabila, Z. (2025). Analisis Komparatif Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS) Dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 2*(2), 691-702.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems (14th ed.)*. Pearson.

Scott, W. R. (2014). *Institutional Theory: Ideas and Interests*. Sage Publications.

Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). IFRS adoption and accounting quality: a review. *European accounting review, 16*(4), 675-702.

Suhartono, S. (2018). Analisis komparasi relevansi nilai informasi akuntansi sebelum dan sesudah adopsi penuh IFRS di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 11*(1).

THARASIA YEYES, W. I. L. D. A. (2019). ANALISIS KOMPARASI TERHADAP KUALITAS AKUNTANSI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA *(Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANNJUNGPINANG)*.

World Bank. (2024). *Financial Reporting and Transparency Assessment*. World Bank Group.